

**AKIBAT HUKUM KETIDAK ADANYA KETURUNAN (*PUTUNG*)
TERHADAP PEWARISAN TANAH KARANG AYAHAN DESA
BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT BALI**

(Studi di Desa Pekraman Bangkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai
gelar kesarjanaan S-2 Program Studi
Magister Kenotariatan

Oleh :

I NYOMAN ALIT, SH
B4B 003 103

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

Tesis

AKIBAT HUKUM KETIDAK ADANYA KETURUNAN (*PUTUNG*) TERHADAP PEWARISAN TANAH KARANG AYAHAN DESA BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT BALI

(Studi di Desa Pekraman Bangkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)

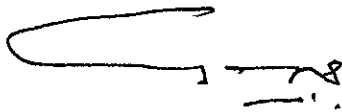
Oleh :

I NYOMAN ALIT, SH
B4B 003 103

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 26 Agustus 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui,

Pembimbing



Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH.
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



MULYADI, SH., MS
NIP. 130 529 429

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis **Akibat Hukum Ketidak Adanya Keturunan (Putung) Terhadap Pewarisan Tanah Karang Ayahan Desa Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali** (Studi di Desa Pekraman Bangkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng) maupun dapat menyelesaikan study pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sesuai dengan harapan.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro,
2. Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
3. Bapak H. Mulyadi, SH., MS selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Yunanto, SH., MHum, selaku Sekretaris Program Bidang Akademis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Budi Ispiyarso, SH., Mhum selaku Sekretaris Program Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

6. Bapak Prof. I.G..N. Sugangga, SH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya ilmiah ini;
7. Bapak/Ibu Dosen Penguji tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada karya ilmiah ini;
8. Seluruh staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
9. Dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kemudian pada hakekatnya penulis berharap semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis sadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, Agustus 2005

ttd

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan, dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, **Agustus 2005**

Penulis

Abstraksi

Akibat Hukum Ketidak Adanya Keturunan (*Putung*) Terhadap Pewarisan Tanah Karang Ayahan Desa Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa juga penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari masa ke masa. Maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lain berbeda. Seiring dengan perjalanan waktu tingkat peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sedikit banyak yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu tetap ada. Seperti halnya keberadaan konsepsi komunalistik religius pada pola penguasaan tanah-tanah adat yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Seperti misalnya keberadaan Hukum Waris Adat Bali yang berkaitan dengan pewarisan tanah karang ayahan desa yang terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang mana pola kewarisan tersebut tetap ada dengan penyesuaian dengan keadaan jaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), Teknik pengumpulan data dengan cara teknik wawancara, dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis datanya secara kualitatif.

Sistem pewarisan di desa pekraman Bangkala ini tidak lepas dari sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut pada masyarakat Hindu di Bali. Selanjutnya kewarisan tanah karang ayahan desa mengikuti sistem kewarisan mayorat, yang mana tanah karang ayahan desa tersebut tidak boleh dibagi-bagi dan diwariskan secara penuh terhadap anak laki-laki tertua untuk wangsa bangsawan/tri wangsa (Brahmana, ksatria dan waisya), sedangkan wangsa Sudra tanah karang ayahan desa tersebut diwariskan secara penuh terhadap anak laki-laki bungsu.

Status hukum tanah karang ayahan desa di desa Pekraman Bangkala jika tidak ada keturunan (*putung*) dalam keluarga yang menguasai tanah karang ayahan maka tanah tersebut akan dikembalikan kepada desa dan oleh desa selanjutnya penguasaanya akan diberikan kepada warga desa Pekraman Bangkala yang berhak dengan melalui ketentuan dan upacara-upacara yang diwajibkan untuk perpindahan hak tersebut. Pengambil alihan oleh desa ini memenuhi ketentuan bahwa pada dasarnya hak atas tanah tersebut milik desa dan warga desa yang bersangkutan yang menguasai dengan hak pakai.

ABSTRACT

**The Legal Impact on The Non Existence of Descendant (Putung) to The
Inheritance of Karang Ayahan Village Lands on The Basis of Balinese
Inheritance Custom Law
(A Study in Pekraman Bangkala Village, the District of Kubutambahan, The
Regency of Buleleng)**

Custom is reflection of a nation's personality and also a soul of nation from time to time. Therefore, every nation in the world has its own different custom one to another. As the time goes by the civilization level and the modern life style, in fact, cannot eliminate the customs living in community. It is seen, more or less, in the advance of era that the customs adapt themselves by the condition and willingness of time so that the customs are still exist/. Like the existence of the religious communalistic concept on the custom lands authorizing pattern that enables land authorizing individually, by the individual rights on lands, and also contains togetherness element. For example, the existence of Balinese Inheritance Custom Law related to the inheritance karang ayahan village lands occurred in the Regency of Buleleng in which the inheritance pattern is still exist along with the adaptation of time.

This research applied juridical empiric approach. The data used in this research was primary and secondary data (primary and secondary material of law). The data collection method was by interview technique, legal document studies. The analysis technique was qualitative.

Inheritance system in pekraman Bangkala village was not out of patrilineal family system held by Hindu community in Bali. Then the inheritance of karang ayahan village lands followed major inheritance system, that is, the karang ayahan village lands were not inherited and divided fully to the oldest son for wangsa bangsawan (aristocrat group) / tri wangsa (Brahmana, Ksatria, and Waisya). Whereas, for wangsa Sudra (group of ordinary people), the karang ayahan village lands were inheritance fully for the youngest son.

Legal status on karang ayahan village lands in Pakraman Bangkala Village, if there is no descendants (putung) in a family owns the karang ayahan village land, so the land is returned to the village and by the village, the land is given to the villagers of Pekraman Bangkala village who have the rights through the stipulation and ceremonies assigned for the right transfer. The taking over by village meets the requirement that basically the right on the lands belong to the village and the villagers own the lands by utilizing rights.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Pernyataan.....	v
Abstraksi.....	vi
Abstract	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Skema	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
2.1. Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat.....	9
2.1.1. Sistem Kewarisan Individual	9
2.1.2. Sistem Kewarisan Kolektif.....	10
2.1.3. Sistem Kewarisan Mayorat	12
2.2. Sistem Keturunan/Keluargaan yang Mempengaruhi Hukum Waris Adat.....	14
2.3. Unsur-unsur Hukum Waris Adat	16
2.4. Jenis-Jenis Harta Peninggalan	17
2.5. Sistem Pewarisan Tanah Karang Desa/Ayahan Desa Menurut Hukum Adat Bali	19
2.6. Keberadaan Hak Ulayat Dalam UUPA	22

2.7. Hak Pakai Atas Tanah Milik Adat.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Metode Pendekatan	29
3.2. Spesifikasi Penelitian	29
3.3. Lokasi Penelitian	30
3.4. Populasi dan sampel	30
3.5. Jenis dan Sumber Data	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	33
3.7. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	35
4.1.1. Jumlah Penduduk di Desa Pekraman Bangkala..	35
4.1.2. Jumlah Tanah Karang Ayahan Desa di Desa Pekraman Bangkala.....	38
4.2. Penerapan Sistem Pewarisan Terhadap Tanah Karang Ayahan Desa Di Desa Pekraman Bangkala...	44
4.2.1. Hukum Kekeluargaan Di Desa Pekraman Bangkala.....	44
4.2.2. Hak Masyarakat Atas Tanah Karang Ayahan Desa Di Desa Pekraman Bangkala.....	46
4.2.3. Kewarisan Tanah Karang Ayahan Desa Di Desa Pekraman Bangkala.....	52
4.3. Status Hukum Tanah Karang Ayahan Desa Jika Tidak Ada Keturunan (Putung) Di Desa Pekraman Bangkala.....	58
4.3.1. Kasta dan Pewarisan Tanah Karang Ayahan Desa.....	58
4.3.2. Hak Perorangan Atas Tanah Karang Desa Di Desa Pekraman Bangkala	61
4.3.3. Kedudukan Tanah Karang Ayahan Desa Pekraman Bangkala Dalam Keluarga Yang Tidak Ada Keturunan (Putung).....	70

BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran-Saran	78
 Daftar Pustaka	79
Lampiran.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	36
Tabel 4.2.....	37
Tabel 4.3.....	37

DAFTAR SKEMA

Skema 4.1.....	53
Skema 4.2.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa juga penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari masa ke masa. Maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lain berbeda. Hal ini terlihat pula dalam kehidupan bermasyarakat, selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara kita berperilaku atau bertindak. Di negara kita, norma-norma yang masih sangat dirasakan adalah norma-norma adat, norma-norma agama, norma-norma moral, dan norma-norma hukum negara. Oleh karena negara kita terdiri atas berbagai pulau-pulau dan suku bangsa, serta ada kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, maka norma-norma moral, norma-norma adat, dan norma-norma agama yang ada dan berlaku juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, berlakunya suatu norma hukum negara bersifat mutlak, dalam arti bahwa setiap norma hukum negara berlaku bagi seluruh masyarakat yang berada di negara kita sehingga dikatakan bahwa norma-norma

adat, norma-norma agama, dan norma-norma moral memiliki perbedaan-perbedaan dengan norma hukum negara.

Seiring dengan perjalanan waktu tingkat peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sedikit banyak yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu tetap ada.

Seperti halnya keberadaan konsepsi komunalistik religius pada pola penguasaan tanah-tanah adat yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.¹ Pola penguasaan ini tidak dapat dilepaskan dari peran dari negara. Sebagai salah satu unsur esensial pembentukan negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan suatu keadaan yang *conditio sine qua non*.

¹ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999, Hal 181

Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan campur tangan negara, dalam hal ini diwakili/diurus oleh pihak yang berwenang di bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan setempat, hal itu berkaitan dengan lahirnya, berpindahnya dan berakhirnya hak milik atas tanah tersebut.

Seperti misalnya keberadaan Hukum Waris Adat Bali yang berkaitan dengan pewarisan tanah karang ayahan desa yang terjadi di wilayah Desa Pekraman Bangkala, Kecamatan Kubutambahan, Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang mana pola kewarisan tersebut tetap ada dengan penyesuaian dengan keadaan jaman.

Pewarisan tanah karang ayahan desa ini juga berkaitan dengan penetapan para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan material dari peraturan hukum itu tidak sama. Apabila penetapan itu di dalam kenyataan sosial sehari-hari dituruti oleh masyarakat, maka kekuatan material penetapan itu adalah 100 % utuh. Sebaliknya sesuatu penetapan yang tidak dituruti di dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat, meskipun formal mengandung peraturan hukum, kekuatan materialnya adalah nihil.

Pola pewarisan tanah karang ayahan desa ini juga dipengaruhi oleh pola penguasaan tanah yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 tahun 1960, yang mana tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi

yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bersama, jadi hak-hak adat tidak dibenarkan menghalang-halangi adanya kepentingan yang lebih luas/umum, karena pada dasarnya tanah memiliki fungsi sosial. Bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemiliknya yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.

Dalam negara agraris seperti Indonesia permasalahan pemanfaatan tanah muncul sebagai suatu hal yang universal. Hal itu terjadi karena tanah bagi suatu masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat khususnya yang berkaitan dengan masalah tingkat kesejahteraan individu atau kelompok.

Pada sistem kewarisan adat Bali, hak pakai atas tanah karang ayahan desa tersebut diwariskan secara utuh secara turun temurun oleh pewaris kepada ahli waris yang ditunjuk biasanya anak laki-laki tertua atau anak bungsu dan tidak dibagi-bagikan. Kenyataan-kenyataan ini, sedikit banyak menimbulkan perasaan ketidakadilan dari ahli waris lain yang tidak mendapatkan warisan. Peristiwa-

peristiwa hukum ini banyak terjadi di dalam suatu masyarakat adat Bali, namun segala permasalahan yang timbul akan diselesaikan dengan musyawarah. Sebab pada dasarnya sifat dari Hukum Waris Adat, nampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif/komunal, kebersamaan serta kongkrit bangsa Indonesia. Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi waris, benar-benar mewarnai dari hukum Waris Adat. Jarang kita melihat sengketa-sengketa mengenai pembagian harta kekayaan (warisan) dibawa ke tingkat Pengadilan. Budaya bangsa Indonesia menganggap tidak etis jika pembagian warisan menjadi masalah yang mengakibatkan perpecahan antar keluarga apalagi sampai ke pengadilan.

Kenyataan-kenyataan hukum yang ada di masyarakat tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pewarisan tanah karang ayahan desa keluarga yang menguasai tanah karang ayahan desa tetapi tidak mempunyai keturunan (*Putung*). Penelitian ini penulis lakukan di Desa Pekraman Bangkala Kecamatan Kubutambahan, Pemerintah Kabupaten Buleleng.

1.2. PERMASALAHAN

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sistem pewarisan terhadap tanah karang ayahan desa ?
2. Bagaimanakah status hukum tanah karang ayahan desa jika Pewaris/pemegang hak tidak ada keturunan (putung) ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penerapan sistem pewarisan terhadap tanah karang ayahan desa.
2. Status hukum tanah karang ayahan desa jika tidak ada keturunan (putung).

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi kalangan teoritis dan kalangan praktis.

1. Bagi kalangan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah pustaka dalam bidang Hukum Waris Adat;

2. Bagi kalangan praktis, diharapkan bisa memberikan pencerahan terhadap pola penyelesaian permasalahan pewarisan tanah karang ayahan desa di Kabupaten Buleleng.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Tesis ini akan disusun dengan sistematika penulisannya dibagi dalam 5 (lima) bab, sebagaimana diuraikan berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang: Latar belakang permasalahan, Permasalahan, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Tesis.

Bab II tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang sistem kewarisan dalam hukum adat, sistem keturunan/kekeluargaan yang mempengaruhi hukum waris adat, unsur-unsur hukum waris adat, sistem pewarisan tanah karang ayahan desa menurut hukum adat Bali, dan hak penguasaan atas tanah adat dalam hukum tanah nasional.

Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data dan analisa data.

Bab IV Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang diawali dengan diuraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, selanjutnya diuraikan hasil penelitian tentang penerapan sistem pewarisan terhadap tanah karang ayahan

desa, dan status hukum tanah karang ayahan desa jika tidak ada keturunan (putung).

Bab V Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk perbaikan dari hasil penelitian di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. SISTEM KEWARISAN DALAM HUKUM ADAT

Sistem kewarisan menurut hukum adat berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya, yaitu sistem keturunan dan kekerabatannya yang pada pokoknya dibedakan dalam tiga macam, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Selanjutnya di Indonesia ini kita menjumpai 3 (tiga) sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut:²

2.1.1. Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Batak yang Patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada

²I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 11-13, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit PT. Toko Gunung Agung Jakarta, 1995, hal. 165-168, dan Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 15-19

belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi harta milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

Kebaikan sistem individual ini ialah dengan adanya pembagian maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan. Hal ini kebanyakan berlaku di kalangan masyarakat adat di perantauan, yang telah jauh dari kampung halaman asalnya.

2.1.2. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu disebut *harta pusaka* di Minangkabau,

atau *hartou menyayanak* di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung), bentuk rumah kerabat tersebut di masa sekarang dapat dilihat contoh-contohnya di TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta.³

Jadi dalam kewarisan kolektif harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (Marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh anggota keluarga/kerabat bersangkutan. Para anggota keluarga/kerabat boleh memanfaatkan tanah pusaka itu untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu (didiami) oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya, tetapi tidak boleh dimiliki sebagai hak milik perorangan. Segala sesuatunya diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota kerabat bersangkutan.⁴

Di masa sekarang sistem kewarisan kolektif ini sudah banyak kelemahan-kelemahannya, antara lain dikarenakan sebagai berikut:⁵

- a. banyak di antara anggota kelompok keluarga/kerabat waris yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman;

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 16

⁴ *Ibid.* hal. 17

⁵ *Ibid.*

- b. tidak adanya anggota keluarga/kerabat atau tua-tua kerabat yang mau mengurus dan memeliharanya;
- c. tanah pusaka terbengkalai tidak diurus dan diusahakan, rumah pusaka lambat laun menjadi lapuk dan rubuh; dan
- d. sering terjadinya perselisihan di antara anggota kelompok keluarga/kerabat dikarenakan ada di antaranya yang ingin menguasainya dan dimiliki secara pribadi, atau mentransaksikannya secara pribadi dengan pihak ketiga.

Di kalangan keluarga-keluarga orang Minangkabau sudah terjadi pewarisan bangunan rumah hasil pencarian orang tua, tidak lagi menjadi harta pusaka rendah melainkan diwariskan kepada anak laki-laki dengan surat wasiat orang tua (bapak). Di daerah perantauan keluarga-keluarga Minangkabau cenderung berubah dari susunan keluarga yang matrilineal menjadi parental.

2.1.3. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat ialah bahwa harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak

tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatra Selatan dan Lampung.⁶

Sistem Kewarisan mayorat ini bersama dengan sistem kewarisan kolektif di mana harta peninggalan itu tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai bersama sebagai hak milik bersama. Bedanya ialah pada sistem mayorat anak tertua berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Jadi anak tertua berkedudukan sebagai menggantikan ayahnya (di Lampung) atau menggantikan ibunya (di Semendo). Sedangkan pada sistem kolektif harta peninggalan itu dikuasai oleh mamak kepala waris (Minangkabau).

Kelemahan sistem kewarisan mayorat sama saja dengan sistem kewarisan kolektif, di mana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama itu bergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok kerabat yang mempertahankannya. Menurut pengamatan Hilman Hadikusuma, misalnya di lingkungan masyarakat adat

⁶ *Ibid.*

Lampung Tulangbawang (Menggala), kenyataannya sebagai berikut:⁷

- a. tanah atau rumah pusaka tinggi kakek ke atas ditunggu orang tua-tua, atau diupahkan kepada orang lain untuk menjaga atau mendiaminya;
- b. tanah atau rumah pusaka tinggi di pedesaan asli ditinggalkan terbengkalai, dan yang berupa tanah kebun tua tidak lagi dimanfaatkan, sehingga terjadi pemakaian atau transaksi yang tidak sah;
- c. tanah atau rumah pusaka rendah, hasil pencaharian orang tua ketika hidupnya, di kampung atau di kota perantauan, dilakukan pembagian seimbang merata oleh para waris; dan
- d. tanah atau pusaka rendah diurus oleh Yayasan keluarga para waris yang berbadan hukum dengan akta Notaris untuk kepentingan umum, menjadi wakaf bagi kemaslahatan pendidikan umum atau keagamaan (untuk bangunan sekolah atau rumah ibadah, masjid dan sebagainya).

2.2. SISTEM KETURUNAN/KEKELUARGAAN YANG MEMPENGARUHI HUKUM WARIS ADAT

Berbicara tentang sistem kewarisan, tidaklah dapat lepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Apabila masyarakat adat yang ada di Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, bersuku-suku, berkepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk kekeluargaan maupun kekerabatan yang berbeda-beda pula. Tetapi walaupun demikian, pada umumnya dapat dikatakan

⁷ *Ibid*, hal. 18-19

bahwa sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat-masyarakat adat di Indonesia dikenal ada 3 (tiga) jenis:⁸

1. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga Bapak (Suami), harta yang ada milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.

Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya pun suaminya meninggal dunia, sepanjang dia setia menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya, menjaga tetapi nama baik suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya.

Contoh dari masyarakat adat yang menarik garis keturunan kekeluargaan Patrilineal: Batak, Bali, Lampung, Nias, Seram, Ambon dan lain-lain.

2. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem dimana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui Ibu, Ibu dari Ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga Ibu. Suami atau Bapak tidak masuk dalam keluarga Ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan.

Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain: masyarakat Minangkabau, Enggano dan lain-lain.

3. Sistem Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan Ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai

⁸ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 14

moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, terutama dalam hal kewarisan.

Contoh dari masyarakat hukum ini adalah antara lain: Jawa meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain.

2.3. UNSUR-UNSUR HUKUM WARIS ADAT

Dalam hukum waris pada pokoknya ada 3 (tiga) unsur untuk dapat terlaksananya pewarisan, yaitu:⁹

1. PEWARIS

Pewaris menurut Hilman Hadikusuma adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat, harta peninggalan mana (akan) diteruskan penguasaan atau pemilikannya, dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi.¹⁰ Selanjutnya menurut I.G.N. Sugangga, Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan atau menyerahkan harta warisan.¹¹

2. WARISAN

Warisan atau Harta warisan adalah harta peninggalan dan hak-hak yang menyangkut kebendaan setelah dikurangi bagian harta bersama suami atau istri, biaya penguburan (biaya perabuan di Bali), hutang dan wasiat.¹²

3. AHLI WARIS

Hilman Hadikusuma memberikan pengertian waris adalah anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta peninggalan, baik berupa barang berwujud yang tidak terbagi atau terbagi maupun harta yang tidak terwujud benda, seperti kedudukan dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata-tertib adat bersangkutan.¹³

Menurut hukum Hindu yang dimaksud dengan waris adalah terutama anak-anak lelaki, karena hanya anak lelaki yang menurut agama dapat menyelamatkan arwah leluhur dan

⁹ Hilman hadikusuma, *Op.Cit.* hal. 9

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ I.G.N.Sugangga *Op. Cit.* hal 4

¹² *Ibid.*

¹³ Hilman hadikusuma, *Op.Cit.* hal. 11

roh pewaris (ayahnya) dari ancaman *Neraka Put*. Walaupun anak-anak wanita masih ada kemungkinan menjadi waris dengan syarat-syarat tertentu.¹⁴

Ahli Waris adalah:¹⁵

- a. mereka yang mempunyai pertalian kekeluargaan dengan pewaris, baik melalui perkawinan maupun melalui pertalian darah; atau
- b. Suami atau istri dan orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

2.4. JENIS-JENIS HARTA PENINGGALAN

Harta peninggalan secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁶

1. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi.

Harta warisan tidak dapat dibagi-bagi hal ini dengan alasan sebagai berikut:¹⁷

- a. sifatnya memang tidak mungkin untuk dibagi-bagi;
 - barang-barang milik suatu kerabat atau famili.
- b. kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat atau jabatan tertentu;
 - barang-barang keramat keraton atau kerajaan.
- c. belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan;
 - tanah kasikepan di daerah Cirebon.
- d. pembagiannya untuk sementara ditunda;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ I.G.N. Sugangga, *Op. Cit.* hal 4

¹⁶ Otje Salman, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, Hal. 55

¹⁷ Soerojo Wignjodipuro, *Ibid.* hal 166

- bila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya tersebut selalu dan ditolak oleh Hakim.
- e. hanya diwarisi oleh seorang saja sehingga tidak perlu dibagi-bagi.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini di beberapa lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya yang memang tidak memberi kemungkinan untuk tidak memiliki barang itu bersama-sama, dengan ahli waris lain-lainnya, sebab harta dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, atau barang itu merupakan lambang persatuan serta kesatuan daripada keluarga yang bersangkutan.

Tiap anak yang lahir dalam keluarga itu turut serta menjadi pemilik, sedangkan tiap-tiap suami ataupun istri yang meninggal dunia selalu membiarkan saja barang-barang itu dalam keadaan yang semula. Contoh harta warisan semacam ini dapat disebut:¹⁸

- a. harta-pusaka di Minangkabau;
- b. Tanah-dati di semenanjung Hitu (Ambon).

2. Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi.

¹⁸ *Ibid.*

Mengenai harta waris yang dapat dibagi-bagi ini terdapat batasan-batasan yang meliputi:¹⁹

- a. hibah dan hibah wasiat;
- b. kedudukan dan bagian janda dan anak-anak;
- c. kedudukan anak angkat dan anak tiri; dan
- d. lain-lain yang bersangkutan dengan harta Waris yang dapat dibagi-bagi.

2.5. SISTEM PEWARISAN TANAH KARANG AYAHAN DESA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

Dilihat dari sudut hukum adat waris Bali, maka harta warisan kekayaan pewaris dapat dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu harta warisan yang dapat dibagi-bagi dan harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi umumnya bersifat non magis religius adalah dapat berwujud harta warisan yang dulunya merupakan hasil jerih payah pewaris atau harta yang diperoleh selama/semasa perkawinan, harta bawaan yang diperoleh dari nenek moyang yang berupa sawah, ladang maupun rumah. Sedangkan yang tidak dapat dibagi-bagi hal ini umumnya berbentuk harta yang mempunyai nilai-nilai religius seperti tempat sembahyang (*sanggah*, *pemerajan*), keris-keris pusaka dan harta lainnya yang khusus diperuntukkan buat kepentingan yang tidak terpisahkan dengan harta magis religius seperti tanah *laba pura*, *druwe tengah* dan lain-lain.

¹⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal.45-46

Dalam Hukum Adat Waris Bali selain kedua bentuk tersebut masih dikenal adanya harta warisan yang berupa tanah karang ayahan desa yang bisa diwariskan kepada salah seorang ahli waris saja. Tanah karang ayahan desa ini bukan milik perseorangan yang dapat diwarisi secara mutlak oleh ahli waris tanpa tergantung pada tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang bersangkutan paut dengan desa. Tanah karang ayahan desa ini adalah tanah-tanah berstatus hak milik desa, dimana tiap-tiap warga desa yang memegang Tanah karang ayahan desa hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun, dan pada prinsipnya seseorang yang sudah turun ngayah (sudah kawin) hanya boleh memegang satu bagian Tanah karang ayahan desa, sebab konsekuensinya memegang lebih dari satu Tanah karang ayahan desa berarti memegang 2 (dua) ayahan, sehingga hal ini tidak dimungkinkan dilakukan oleh satu orang.²⁰

Seorang pemegang Tanah karang ayahan desa adalah ngayahang tanah desa tersebut, dalam arti memikul tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh Tanah karang ayahan desa tersebut. Kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas yang mengikuti tanah tersebut jelasnya dapat disebut sebagai unsur bawaan dari pada Tanah karang ayahan desa untuk diayahkan, maka ia sekaligus harus berani merangkul unsur bawaan dari tanah tersebut yaitu

²⁰ | Ketut Artadi *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, CV. Sumber Mas Bali, Denpasar, 1987, hal. 19

memikul kewajiban langsung ke desa maupun ke pura kahyangan tiga.²¹

Dalam kaitannya dengan pewarisan Tanah karang ayahan desa berlaku prinsip-prinsip:²²

1. Seorang yang sudah turun ngayah (sudah kawin) hanya boleh memegang satu bagian tanah ayahan (tanah adat);
2. Berdasarkan asas keturunan, anak-anak, cucu-cucu serta muncul sebagai ahli waris dari tanah-tanah ayahan yang pernah dipegang oleh orang tuanya;
3. Tanah ayahan tidak boleh dibagi-bagi di antara para ahli waris;
4. tiap-tiap warga desa yang memegang tanah ayahan hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun, sedangkan pemegang hak milik tetap pada desa adat;
5. Tanah ayahan tidak dapat dijual dalam arti pengalihan hak milik, tetapi penjualan hak pakainya masih dimungkinkan; dan
6. Tanah-tanah adat tidak dapat diwariskan para ahli waris yang tidak beragama Hindu. Bagi yang meninggalkan Agama Hindu disebut *aninggal kadang* atau meninggalkan keluarga dan ada juga menyebutkan *aninggal kejaten* (meninggalkan jati dirinya) dan bagi mereka yang meninggalkan Agama Hindu gugur haknya sebagai ahli waris (termasuk *drowa ring leluruh*).

Dalam pewarisan Tanah karang ayahan desa inipun masih dipengaruhi pula dengan adanya penggolongan dalam masyarakat Bali yaitu *catur Wangsa/Catur Warna* yang pertama golongan Brahmana, *Ksatria*, *Weisya* untuk ketiga golongan ini disebut sebagai golongan bangsawan atau *tri wangsa*) dan golongan *sudra* atau

²¹ | Ketut Artandi, *Ibid*.

²² | Made Suasthawa Dharmayuda, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 2001, hal. 140

golongan kebanyakan. Terhadap golongan keluarga bangsawan atau *tri wangsa* dengan berlaku sistem kewarisan mayorat dengan pembagian menurut aturan *Panca/catur Uddara* di mana Tanah karang ayahan desa tersebut hanya diwariskan kepada anak laki-laki yang tertua/tersulung. Sedangkan terhadap golongan keluarga sudra/orang kebanyakan Tanah karang ayahan desa tersebut akan diwarisi oleh anak laki-lakinya yang terkecil/terbungsu.²³

2.6. KEBERADAAN HAK ULAYAT DALAM UUPA

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah negara yang bersangkutan. Kita juga mengetahui, bahwa hak-hak penguasaan atas tanah itu dapat diartikan sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret (*subjektief recht*), jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subyek tertentu sebagai pemegang haknya.²⁴

²³ | Made Suasthawa Dharmayuda, *Ibid*.

²⁴ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 253

Hasil pembangunan Hukum Tanah Nasional dengan menggunakan bahan-bahan dari Hukum Adat tersebut merupakan norma-norma hukum tertulis, yang disusun dalam tata susunan atau sistemnya Hukum Adat.

Antara lain hal ini terlihat dari sistem hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, yang dimulai dengan:²⁵

1. Hak bangsa Indonesia, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan hukum publik;
2. Hak Menguasai dari Negara yang bersumber pada hak bangsa, dan beraspek hukum semata. Pelaksanaan sebagian kewenangannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dalam bentuk hak pengelolaan;
3. Hak-hak penguasaan individual, terdiri atas:
 - a. Hak-hak atas tanah;
 - b. Wakaf, hak individual berasal dari Hak Milik yang sudah diwakafkan dan mempunyai sifat serta kedudukan khusus dalam Hukum Tanah Nasional;
 - c. Hak jaminan atas tanah yang disebut Hak Tanggungan.

Selanjutnya dalam UUPA diakui keberadaan dari hak ulayat, yang mana hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebagaimana telah diketahui wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata. Yaitu

²⁵ *Ibid.* hal 204

yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya.²⁶

Untuk serangkaian hak dan kewajiban masyarakat hukum adat itu UUPA memakai hak ulayat. Nama yang ada menunjukkan kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan.

2.7. HAK PAKAI ATAS TANAH MILIK ADAT

Sebagaimana diketahui bahwa persekutuan hukum adat dapat memiliki hak milik atas tanah, untuk pengelolaannya dapat diserahkan pada warga persekutuan tersebut dengan hak pakai.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria, disebutkan bahwa:

1. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

²⁶ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999, Hal 185

2. Hak pakai dapat diberikan:
 - a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - b. dengan Cuma-Cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
3. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Selanjutnya yang boleh mempunyai hak pakai atas tanah adalah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
- d. Badan Keagamaan dan sosial;
- e. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- f. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
- g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Adapun tanah-tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah:

- a. Tanah Negara;
- b. Tanah Hak Pengelolaan;
- c. Tanah Hak Milik.

Mengenai pengalihan hak pakai dijelaskan pada Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria:

1. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pejabat yang berwenang.
2. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Mengenai jangka waktu hak pakai menurut Pasal 45 Undang-Undang Pokok Agraria, adalah 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Kewajiban hak pakai diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, adalah:

- a. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

- b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian penggunaan tanah hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- c. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. menyerahkan kembali tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menyerahkan sertifikat Hak Pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Hapusnya Hak Pakai menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, bila;

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
- b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
 - 1. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52; atau
 - 2. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atau
 - 3. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;

- d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1961;
- e. ditelantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan Pasal 40 ayat (2).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan sistematika dan prosedur yang harus ditempuh dengan tidak mungkin meninggalkan setiap unsur, komponen yang diperlukan dalam suatu penelitian. Maka satu-satunya jalan yang perlu ditempuh adalah memberikan cara/metode penyajian yang efektif dan efisien, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

1. METODE PENDEKATAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode *pendekatan yuridis-empiris*, hal ini sebagaimana diketahui untuk mempelajari hukum dibedakan dalam 2 (dua) cabang studi, *pertama* hukum dapat dipelajari, dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *Law In Book*, sedangkan yang *kedua* adalah hukum juga dipelajari, dan diteliti sebagai studi mengenai *Law In Action*.²⁷

2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁸ Dikatakan deskriptif,

²⁷ Ronny Hanitjasumitro, *Masalah-Masalah Hukum*, No. 5 Tahun 1992, hal 48

²⁸ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63

maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai Akibat hukum ketidak adanya keturunan (*putung*) terhadap pewarisan tanah karang ayahan desa. Sedangkan analisis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang kewarisan tanah karang ayahan desa tersebut.

3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pekraman Bangkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Pemerintah Provinsi Bali.

4. POPULASI DAN SAMPLE

Tiap penelitian memerlukan sejumlah orang/benda yang harus kita selidiki. Secara ideal kita harus menyelidiki keseluruhan populasi. Bila populasi terlampaui besar kita ambil sejumlah sampel yang *representatif*, yaitu yang mewakili keseluruhan populasi itu. Dengan menyelidiki sampel itu kita ambil kesimpulan berupa generalisasi, yang kita anggap juga berlaku bagi keseluruhan populasi tersebut.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya.²⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah orang atau lembaga yang terkait dengan pewarisan tanah karang ayahan desa.

b. Teknik Sampling

Sampling atau sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi obyek penelitian. Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah obyek penelitian.

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *judgemental/purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Kepala Desa Bangkala;
2. Klian Desa Pekraman/Adat Bangkala;
3. Klian Banjar Kajianan;
4. Klian Banjar Kelodan;
5. Klian Banjar Dinas Kajianan;
6. Klian Banjar Dinas Kelodan;

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57

7. 6 (enam) kepala keluarga yang menempati tanah karang ayahan desa Bangkala.

5. JENIS DAN SUMBER DATA

Sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data antara lain data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁰

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.³¹

Sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, sebagaimana yang diuraikan di bawah:³²

³⁰ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hal. 34

³² *Ibid.*

1. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya.
2. Bahan hukum sekunder berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.

6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dipengaruhi oleh adanya metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan cara, wawancara, baik secara terstruktur maupun tak struktur, secara observasi, dan angket.

Dalam pengumpulan datanya selain menggunakan wawancara, observasi, dan angket, dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian ini.

7. ANALISIS DATA

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diklasifikasikan. Terhadap semua data yang telah diklasifikasikan tersebut dilakukan analisis yang bersifat kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan

sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian para penulis buku kepustakaan yang merupakan data sekunder.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1.1. Jumlah Penduduk Di Desa Pekraman Bangkala

Menurut Awig-Awig Desa Pekraman Bangkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali diterangkan bahwa yang bisa disebut sebagai warga desa pekraman Bangkala adalah sebagai berikut.³³

1. *Sane Kasengguh Krama Desa inggih punika* (yang bisa disebut warga Desa Pekraman Bangkala adalah):
 - a. *kulewarga sane pastika me-agama Hindu* (warga yang beragama Hindu);
 - b. *Sane ngamong karang ayahan desa inggihan sane tan* (yang menempati karang ayahan desa maupun yang tidak; dan
 - c. *Sampun pastika marabian saha nyungsung Khayangan Desa Bangkala* (mereka yang sudah menikah dan percaya pada pura Khayangan Desa Bangkala);
2. *Sajaba punika kasengguh tamiu* (di luar itu adalah tamu).
3. *Krama desa kapah dados papat luire* (warga Desa Bangkala dibagi dalam 4 (empat), yaitu:
 - a. *krama desa sane kawastanin KUBAYAN keh ipun kalih diri* (warga desa yang bernama KUBAYA jumlahnya 2 (dua) orang;
 - b. *krama desa sane kawastanin JRO BAU keh ipun petang diri* (warga desa JRO BAU jumlahnya ada 4 (empat) orang);
 - c. *krama desa sane kawastanin DESA MELINGGIH (desa Negak) keh ipun petang dasa diri* (warga desa

³³ Awig-Awig Desa Pekraman Bangkala Palet 1 Pawos 4

MELINGGIH (negak) jumlahnya ada 40 (empat puluh) orang);

d. *krama desa sane kawastanin KRAMA DESA ALIT (desa cenik)* (warga desa kecil atau desa ngayah).

sajabaning krama malinggih miwah krama tamiu

4. *Krama desa Alit kakepah malih dados kalih inggih punika* (warga desa kecol dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu):

a. *krama desa alit sane keranjing ring sibak kangin* (warga desa bagian kangin);

b. *krama desa alit sane keranjing ring sibak kauh*(warga desa bagian kauh).

5. *soang-soang sibakan kakepah malih dados kemitan luire:*

a. *kemitan Kliwon* (seksi kliwon);

b. *kemitan Umanis* (seksi Umanis);

c. *kemitan pahing* (seksi pahing);

d. *kemitan pon* (seksi pon).

6. *Swadarmaaning soang-soang kemitan inggih punika sekadi ring sor* (Tanggungjawab tiap-tiap seksi adalah):

a. *kemitan Kliwon keni jerimpen ring pura dalem miwah kumpin desa* (seksi kliwon bertanggung jawab upacara jerimpen di pura kumpin dan pura dalem);

b. *kemitan Umanis keni jerimpen ring pura Bale agung* (seksi umanis bertanggung jawab upacara jerimpen di pura agung);

c. *kemitan Paing keni jerimpen ring pura Botoh*(seksi pahing bertanggungjawab upacara jerimpen di pura puseh);

d. *kemiten pon keni jerimpen ring pura bantes*(seksi pon bertanggung jawab upacara jerimpen di pura bantes);.

Tabel 4.1. Jumlah penduduk Desa Bangkala tahun 2004

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.013 Orang
2.	Perempuan	1.119 Orang
<i>Jumlah</i>		2.132 Orang

Sumber: Data Monografi Desa Pekraman Bangkala periode Desember 2004

Penduduk desa Pekraman Bangkala pada tahun 2004 tercatat 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) jiwa, dengan perincian laki-laki sejumlah 1.013 (seribu tiga belas) jiwa dan perempuan sejumlah 1.119 (seribu seratus sembilan belas) jiwa.

Tabel: 4.2. Jumlah Penduduk Desa Pekraman Bangkala Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	5 Orang
2.	Sekolah dasar	1.758 Orang
3.	SMP	136 Orang
4.	SMA	185 Orang
5.	Akademi	30 Orang
6.	Sarjana	18 Orang

Sumber: Data Monografi Desa Pekraman Bangkala periode Desember 2004

Tingkat pendidikan penduduk desa pekraman Bangkala masih tergolong terbelakang, hal ini terlihat dari adanya setengah penduduk desa Pekraman Bangkala hanya lulusan Sekolah Dasar yaitu sebesar 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) jiwa, dari 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) jiwa penduduk desa Pekraman Bangkala secara keseluruhan.

Tabel: 4.3. Jumlah Penduduk Desa Pekraman Bangkala Menurut Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	26 Orang

2.	TNI	4 Orang
3.	Swasta	127 Orang
4.	Pedagang	46 Orang
5.	Tani	760 Orang
6.	Tukang	68 Orang
7.	Buruh Tani	785 Orang
8.	Pensiunan	5 Orang
9.	Pemulung	1 Orang
10.	Jasa	28 Orang

Sumber: Data Monografi Desa Pekraman Bangkala periode Desember 2004

4.1.2. Jumlah Tanah Karang Ayahan Desa Pekraman Bangkala

Desa Pekraman Bangkala seluas 496 (empat ratus sembilan puluh enam) Hektare, dengan batas-batas wilayah:

- sebelah Utara : Desa Kubutambahan;
- Sebelah Selatan : Desa Bila;
- Sebelah Barat : Tukad ayahan desa Desa Jagaraga;
dan
- Sebelah Timur : Desa Bulian.

Adapun harta kekayaan desa Pekraman Bangkala antara lain:³⁴

1. Kahyangan Desa, luire (tempat suci, pura besar) antara lain:
 - a. Pura dalem;
 - b. Pura Desa;
 - c. Pura Puseh;

³⁴ Awig-Awig Desa Pekraman Bangkala Palet 5 Pawos 27

- d. Pura Kumpin;
 - e. Pura Bantes;
 - f. Pura Taman ring pascima Pura Bantes; dan
 - g. Wewangunan suci miwah panyiwian Desa Adat sane lianan.
2. *Setra-setra Desa Pakraman luire* (Kuburan yang ada di desa Pekraman antara lain):
 - a. *Setra Ageng (Gede) ring purwa Desa pakraman Bangkala* (Kuburan besar yang letaknya di sebelah timur desa);
 - b. *Setra Alit (Cenik ring pempatan ring purwa Desa Bangkala* (Kuburan anak-anak yang letaknya di pempatan timur desa).
 3. Tanah-tanah Desa Pakraman Bangkala luire:
 - a. Karang Ayahan Desa (PKD);
 - b. Tegal Desa Pakraman.
 4. *Barang-Barang sinanggeh suci, raja purana utawi prasasti saha sarana pebaktiannya* (barang-barang yang dianggap suci, barang milik raja atau prasasti dan alat perlengkapannya);
 5. *Lelanguan luire: Gong kebyar abarung* (Kesenangan atau tetarian gong kebyar selengkapannya);
 6. *Wewangunan Bale Desa Adat miwah wewangunan lianan sane kekaryanan antuk take turun kerama desa adat* (bangunan balai desa Pakraman dan bangunan yang lainnya dikerjakan berdasarkan sumbangan dari warga desa);
 7. LPD (Lembaga Perkreditan Desa).

Di samping tanah karang ayahan desa tersebut, desa Pekraman Bangkala juga memiliki tanah Pelaba Pura baik yang berupa persawahan maupun tegalan, seluas 77.700 M2

(tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), yang sudah dilakukan pendaftaran Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terlihat dari telah diterbitkannya sertipikat tanda bukti hak atas tanah tersebut, yaitu:³⁵

1. Hak Milik Nomor 266/Bangkala yang tercatat atas nama Pura Bantes Desa Pekraman Bangkala, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-05-2004 (empat belas Mei dua ribu empat), Nomor: 00024/Bangkala/2004, seluas 24.900 M² (dua puluh empat ribu sembilan ratus meter persegi), demikian ini berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangkala I Made Astika, tertanggal 10-03-2004 (sepuluh Maret dua ribu empat) Nomor: 48/2010/III/2004, dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Panitia A4) tanggal 19-05-2004 (sembilan belas Mei dua ribu empat, Nomor: 8/RPT/Peng.h/2004;
2. Hak Milik Nomor: 268/Bangkala yang tercatat atas nama Pura Dalem Desa Pekraman Bangkala, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-05-2004 (empat belas Mei dua ribu empat), Nomor: 00023/Bangkala/2004, seluas 1.800 M² (seribu delapan

³⁵ Wawancara dengan I Made Astika selaku Perbekel/Kepala Desa Pekraman Bangkala pada tanggal 23 April 2005

ratus meter persegi), demikian ini berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangkala I Made Astika, tertanggal 10-03-2004 (sepuluh Maret dua ribu empat) Nomor: 78/2010/III/2004, dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Panitia A4) tanggal 19-05-2004 (sembilan belas Mei dua ribu empat, Nomor: 7/RPT/Peng.h/2004;

3. Hak Milik Nomor: 270/Bangkala yang tercatat atas nama Pura Bantes Desa Pekraman Bangkala, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-05-2004 (empat belas Mei dua ribu empat), Nomor: 00025/Bangkala/2004, seluas 26.600 M² (dua puluh enam ribu enam ratus meter persegi), demikian ini berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangkala I Made Astika, tertanggal 10-03-2004 (sepuluh Maret dua ribu empat) Nomor: 76/2010/III/2004, dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Panitia A4) tanggal 19-05-2004 (sembilan belas Mei dua ribu empat, Nomor: 2/RPT/Peng.h/2004;
4. Hak Milik Nomor: 271/Bangkala yang tercatat atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Bangkala, sebagaimana

yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-05-2004 (empat belas Mei dua ribu empat), Nomor: 00030/Bangkala/2004, seluas 2.600 M² (dua ribu enam ratus meter persegi), demikian ini berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangkala I Made Astika, tertanggal 10-03-2004 (sepuluh Maret dua ribu empat) Nomor: 69/2010/III/2004, dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Panitia A4) tanggal 19-05-2004 (sembilan belas Mei dua ribu empat, Nomor: 3/RPT/Peng.h/2004;

5. Hak Milik Nomor: 272/Bangkala yang tercatat atas nama Pura Desa Desa Pekraman Bangkala, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-05-2004 (empat belas Mei dua ribu empat), Nomor: 00028/Bangkala/2004, seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), demikian ini berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangkala I Made Astika, tertanggal 10-03-2004 (sepuluh Maret dua ribu empat) Nomor: 55/2010/III/2004, dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Panitia A4)

tanggal 19-05-2004 (sembilan belas Mei dua ribu empat, Nomor: 4/RPT/Peng.h/2004;

6. Hak Milik Nomor: 273/Bangkala yang tercatat atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Bangkala, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-05-2004 (empat belas Mei dua ribu empat), Nomor: 00029/Bangkala/2004, seluas 2.200 M² (dua ribu dua ratus meter persegi), demikian ini berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangkala I Made Astika, tertanggal 10-03-2004 (sepuluh Maret dua ribu empat) Nomor: 60/2010/III/2004, dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Panitia A4) tanggal 19-05-2004 (sembilan belas Mei dua ribu empat, Nomor: 5/RPT/Peng.h/2004; dan
7. Hak Milik Nomor 275/Bangkala yang tercatat atas nama Pura Desa Desa Pekraman Bangkala, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-05-2004 (empat belas Mei dua ribu empat), Nomor: 00031/Bangkala/2004, seluas 9.600 M² (sembilan ribu enam ratus meter persegi), demikian ini berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangkala

I Made Astika, tertanggal 10-03-2004 (sepuluh Maret dua ribu empat) Nomor: 63/2010/III/2004, dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Panitia A4) tanggal 19-05-2004 (sembilan belas Mei dua ribu empat, Nomor: 1/RPT/Peng.h/2004.

4.2. PENERAPAN SISTEM PEWARISAN TERHADAP TANAH KARANG AYAHAN DESA DI DESA PEKRAMAN BANGKALA

Untuk mempermudah proses analisis penulis tentang penerapan sistem pewarisan terhadap tanah karang ayahan desa di desa Pekraman Bangkala, maka terlebih dahulu penulis uraikan tentang hukum kekeluargaan di desa Bangkala, hak masyarakat atas tanah adat di Desa Bangkala, dan terakhir tentang Hukum Adat Waris di Desa Bangkala.

4.2.1. Hukum Kekeluargaan Di Desa Pekraman Bangkala

Dalam hukum adat subyek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai manusia, dan badan hukum (desa, suku, nagari, wakaf, dan akhir-akhir ini juga yayasan. Di pulau Bali didapat pula badan-badan hukum adat seperti *sekaha subak*, *sekaha banjar* yang berarti perserikatan subak, perserikatan banjar.³⁶

³⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 103

Manusia dalam kehidupannya sebagai subyek hukum selalu berusaha menjaga kelangsungan keturunannya agar tidak punah. Dari keturunan ini terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anaknya.

Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga, boleh ikut menggunakan dan berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling pelihara memelihara dan saling bantu membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.³⁷

Pada masyarakat desa Pekraman Bangkala sebagai mana lazimnya umat yang beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Yang mana anak laki-lakilah yang lebih dominan dalam suatu keluarga.

Dalam Kitab Manawa Dharmasastra disebut tentang kedudukan seorang anak laki-laki, yaitu:³⁸

a. buku IX ayat 106 berbunyi:

³⁷ *Ibid.* hal. 108

³⁸ | Gede Pudja dan Tjokorde Rai Sudartha, *Manawa Dharmasastra*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1982, hal. 555-556

Segera setelah lahir anak yang pertama, orang mulai dipanggil ayah dari seorang putra dan dilunaskan dari hutang-hutangnya kepada arwah orang tuanya yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu laki-laki layak menerima semua harta.

- b. buku IX ayat 137 berbunyi;

Melalui anak laki-laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki-laki ia mencapai kekekalan tetapi anak dari cucu ia akan mencapai alam matahari.

- c. buku IX ayat 138 berbunyi:

karena anak laki-laki akan mengantar *Pitara* dari neraka yang disebut *put*, karena ia disebut putra dengan kelahirannya sendiri.

4.2.2. Hak Masyarakat atas Tanah karang ayahan desa di Desa Pekraman Bangkala

Warga desa Pekraman Bangkala mendapatkan tanah ayahan desa berdasarkan keputusan rapat yang dilakukan oleh prajuru/klian desa Pekraman Bangkala, tanpa mendapatkan sertifikat hak pakai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.³⁹

Tanah karang ayahan desa Pekraman Bangkala dapat dimanfaatkan sebagai:⁴⁰

1. *kawigunan tanah desa utawi karang desa ketanggap antuk soang-soang kerama desa, sajawaning kawangun kahyangan Desa saha druwen desa, pura miwah*

³⁹ Wawancara dengan I Made Astika selaku Perbekel/Kepala Desa Pekraman Bangkala pada tanggal 23 April 2005

⁴⁰ Awig-Awig Desa Pekraman Bangkala Palet 5 Pawos 28

wewangunan desa lianan((Pemanfaatan tanah karang ayahan desa dilakukan oleh seluruh warga desa (krama desa) kecuali bangunan suci dan tanah pelaba pura (tanah bengkok));

2. *Prajuru Desa wenang ngetangang padruwen Desa saha kasiarang nyabran awarsa ritatkala paruman krama desa (nangken sasih Januari) antuk ilikita pastika* (Pengurus desa Pekraman mempunyai kewajiban mengatur milik desa dan disiarkan atau dipertanggungjawabkan tiap tahun di waktu ada rapat umum dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di desa).

Tanah karang ayahan desa ini dapat dimiliki oleh warga desa Pekraman Bangkala dengan hak pakai sebagaimana disebutkan.⁴¹

1. *Karang desa pakraman sane kagenahin paumahan antuk soang-soang krama desa kasengguh karang desa maka gena sekala lan niskala, pawiwih Desa makacihna wala tatanggap* (tanah karang ayahan desa yang diisi oleh bangunan, maka tanah tersebut secara nyata dimiliki oleh keluarga yang menempati (hak pakai);
2. *Sesukatan karang Desa sane katanggap antuk krama desa sekadi sampun sane sampun katanggap manut dresta* (Sejak tanah karang ayahan desa dimanfaatkan oleh desa seperti yang tercantum dalam angka 1 di atas) menurut aturan yang ada di desa tersebut (asuluh balangan);
3. *Tegal utawi karang ayahan desa marep ring tanah milik utawi ring desa lianan patut kewatesing antuk pagehan utawi turus/tembok mangde mekaten asri* (tegal atau tanah karang ayahan desa yang dimiliki desa harus diberi pagar supaya aman);

⁴¹ Awig-Awig Desa Pekraman Bangkala Palet 5 Pawos 29

4. *Prade kerasayang pagehan/turus/tembok inucap ngelikadin yaning sampun pada arsa penyandingne, kengin watese nganggen pinget kewaten kesasiang antuk prajuru/klian desa utawi precihna pal* (apabila pagar yang dipakai menggunakan kayu membuat merugikan tetangga yang bersebelahan maka pagar itu perlu dipotong dengan disaksikan oleh pengurus desa atau klian desa maka tanda batas tersebut sah);
5. *Keutsahayang mangda tan wenten karang kabebeng* (diusahakan agar tidak ada tanah karang ayahan desa yang bersengketa);
6. *semaliha yening wenten tiyosan ring Agama Hindu Numbas tanah ring sajebag wewidang Desa manut pararem* (Kalau ada warga yang bukan beragama Hindu membeli tanah di dalam wilayah desa pekraman Bangkala akan ditentukan (diputuskan) oleh Rapat Desa).

Anggota masyarakat yang mendapatkan tanah karang ayahan desa mempunyai kewajiban untuk memberi batas pada tanah yang dipilih, hal ini bertujuan sebagai tanda bahwa tanah karang ayahan desa tersebut telah dikuasai oleh salah satu warga desa Pekraman Bangkala dan akan terlihat indah dan asri.⁴²

Warga desa Pekraman Bangkala mempunyai hak untuk menikmati tanah karang ayahan desa yang berlaku baik terhadap golongan di desa itu sendiri (ke dalam), maupun terhadap mereka yang ada di luar desa (keluar). Ke dalam hal itu diatur sedemikian rupa, sehingga tiap-tiap anggota dari

⁴² Wawancara dengan I Made Astika selaku Perbekel/Kepala Desa Pekraman Bangkala pada tanggal 23 April 2005

desa itu mendapat bagian tanah sendiri-sendiri, dan hak-hak perseorangan ini dapat dibatasi dengan kepentingan-kepentingan dari golongan itu sebagai pembuktian.⁴³

Masyarakat desa Pekraman Bangkala, pada dasarnya merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri pokok, sebagai berikut:⁴⁴

1. manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama ada dua orang. Di dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada;
2. bergaul selama jangka waktu yang cukup lama;
3. adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan;
4. adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas;
5. menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri, juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah masyarakat sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap sebagai indikasi dari hakekat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang lain.

⁴³ Wawancara dengan I Made Astika selaku Perbekel/Kepala Desa Pekraman Bangkala pada tanggal 23 April 2005

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori sosiologi tentang struktur Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 107

Biasa bagaimanapun juga, penggunaan istilah masyarakat tak mungkin dilepaskan dari nilai-nilai, norma-norma, tradisi, kepentingan-kepentingan dari warga masyarakat tersebut.

Keberadaan Hak ulayat sebagai hak dari persekutuan hukum adatpun bisa dijadikan bukti keberadaan dari suatu masyarakat hukum adat itu sendiri. Persekutuan inilah yang mengatur sampai di mana hak-hak perseorangan akan dibatasi untuk kepentingan persekutuan itu. Tanda yang terpenting dari hak ulayat itu ialah ada hubungan yang erat di antara hak persekutuan dengan hak perseorangan.

Sifat komunalistik dalam pemanfaatan tanah karang ayahan desa menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut hak ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan hubungan hukum

antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya itu.⁴⁵

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis.⁴⁶

Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.

Tanah bersama tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sesuatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-

⁴⁵ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999, Hal 181

⁴⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 103

masing dan keluarganya. Peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur oleh kelompok yang bersangkutan, supaya selain dilakukan secara tertib dan teratur untuk menghindarkan sengketa, juga bisa terjaga kelestarian kemampuannya bagi generasi-generasi yang menyusul kemudian.⁴⁷

Demikian hak atas tanah karang ayahan desa merupakan hak masyarakat hukum adat setempat, yang mengandung:⁴⁸

- a. kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, yang termasuk bidang hukum perdata;
- b. tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik.

Tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama, baik yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama maupun bagi kepentingan para warganya, tidak selalu bisa dilakukan bersama oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri.⁴⁹

4.2.3. Kewarisan Tanah Karang Ayahan Desa di Desa Pekraman Bangkala

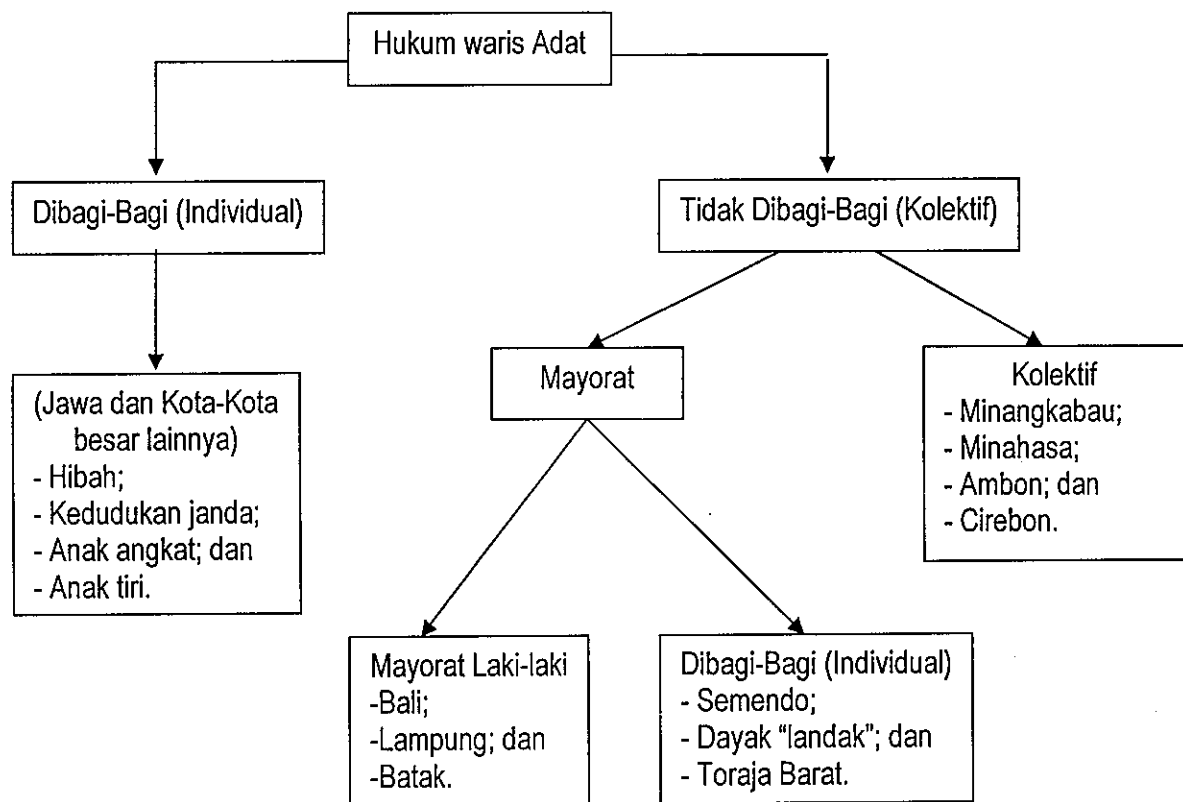
⁴⁷ *Op. Cit.* hal 182

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ *ibid.*

Untuk mengetahui sistem hukum waris yang berlaku di desa Pekraman Bangkala dapat dijelaskan terlebih dahulu tentang sistem Kewarisan di Indonesia.

Skema: 4.1. Hukum Waris di Indonesia



Sumber: Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal 41

Pewarisan tanah karang ayahan desa ini hanya diwariskan pada satu orang anak yaitu anak laki-laki tertua atau termuda. Ahli waris tersebut harus segera menempati atau mengolah

tanah karang ayahan desa tersebut maksimal 6 (enam) bulan sejak diputuskannya kewarisan tersebut.⁵⁰

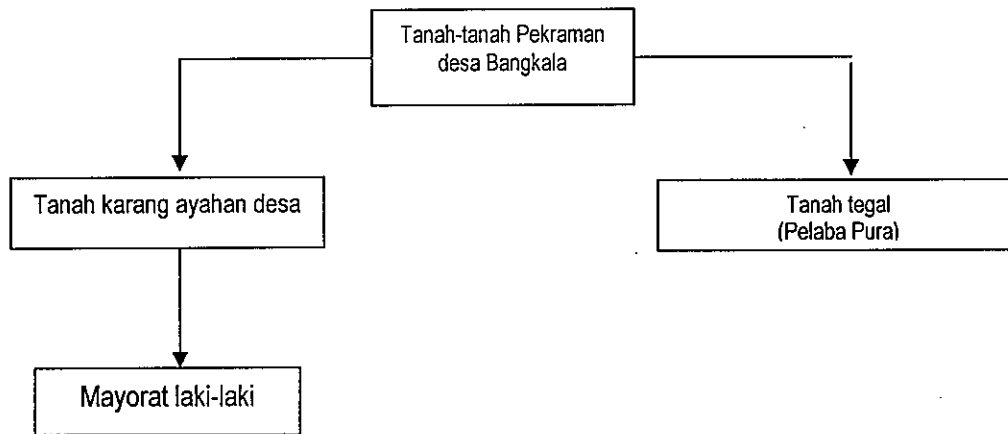
Hal ini disebabkan masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan dimana garis keturunan selalu ditarik hanya melalui pihak laki-laki (garis kepurusa). Sistem kekeluargaan ini disebut dengan istilah tunggal sanggah, tunggal dadiya, tunggal kawitan yang berarti mempunyai satu/ketunggalan leluhur (ketunggalan silsilah).⁵¹

Di dalam lingkungan Bali anak laki-laki adalah suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa, terlebih lagi dalam hubungannya dengan kepercayaan bahwa adanya anak laki-laki dapat menyelamatkan orang tua/nenek moyangnya dari neraka. Jadi anak laki-laki merupakan *pratisenthana* (turunan langsung) yang akan memberikan *bubur pirata* (sesajen) dan *penguruyagan* (kebaktian) kepada nenek moyangnya.

⁵⁰ wawancara dengan I Ketut Sukrawa selaku Klian Banjar Pekraman Kajanan tanggal 24 April 2005

⁵¹ I Gusti Gede Ardana, *Inventarisasi Aspek-Aspek Nilai Budaya Bali*, Proyek Bantuan Sosial tahun 1982/1983, hal. 38

Skema: 4.2. Kewarisan Tanah Ayahan Desa di desa Pekraman Bangkala



Menurut Hukum Waris Adat, harta warisan dapat dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu harta warisan yang dapat dibagi-bagi dan harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi umumnya bersifat non magis religius adalah dapat berwujud harta warisan yang dulunya merupakan hasil jerih payah pewaris atau harta yang diperoleh selama/semasa perkawinan, harta bawaan yang diperoleh dari nenek moyang yang berupa sawah, ladang maupun rumah. Sedangkan yang tidak dapat dibagi-bagi hal ini umumnya berbentuk harta yang mempunyai nilai-nilai religius seperti tempat sembahyang (*sanggah, pemerajan*), keris-keris pusaka dan harta lainnya.

Khususnya berkaitan dengan harta waris yang tidak dibagi-bagi di Desa Pekraman Bangkala dikenal juga harta yang tidak dapat dibagi-bagi yang disebut tanah karang ayahan desa yang mana hanya bisa diwariskan kepada salah seorang ahli waris saja. Karena tanah karang ayahan desa ini bukan milik perseorangan yang dapat diwarisi secara mutlak oleh seorang ahli waris laki baik tertua maupun termuda, dan keberadaan tanah karang ayahan desa pada suatu keluarga tergantung pada tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang bersangkutan paut dengan desa Pekraman Bangkala.⁵²

Tanah karang ayahan desa ini adalah tanah-tanah berstatus hak milik desa, dimana setiap nenek moyang dari kepala keluarga warga desa Pekraman Bangkala memegang Tanah karang ayahan desa, warga desa tersebut hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun, pada prinsipnya seseorang yang sudah turun ngayah hanya boleh memegang satu bagian tanah karang ayahan desa.

Seorang pemegang Tanah karang ayahan desa adalah ngayahang tanah desa tersebut, dalam arti memikul tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh Tanah karang ayahan desa tersebut. Kewajiban dan tugas

⁵² Wawancara dengan I Made Cincin selaku Kelian Desa Pekraman Bangkala tanggal 24 April 2005

merupakan unsur bawaan dari pada Tanah karang ayahan desa tersebut.

Pewarisan tanah karang ayahan desa di desa Pekraman Bangkala berlaku prinsip-prinsip:⁵³

- a. Warga desa yang sudah turun ngayah hanya boleh memegang satu bagian tanah karang ayahan desa;
- b. tanah karang ayahan desa dapat diwariskan kepada keturunannya yang sah;
- c. tanah karang ayahan desa tidak boleh dibagi-bagi di antara para ahli waris suatu keluarga yang menguasainya;
- d. setiap peralihan penguasaan hak atas tanah karang ayahan desa harus sepengetahuan kelian desa karena tiap-tiap warga desa yang memegang tanah ayahan hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun, sedangkan pemegang hak milik tetap pada desa adat;
- e. tanah karang ayahan desa hanya boleh dijual oleh desa untuk hal-hal (pembiayaan) yang telah dibicarakan dalam rapat kelian desa dan tidak dapat dijual dalam arti pengalihan hak milik, pemegang hak pakai diberikan hak untuk menjual hak pakainya dengan sepengetahuan rapat kelian desa; dan
- f. Tanah-tanah adat tidak dapat diwariskan para ahli waris yang tidak beragama Hindu.

⁵³ Wawancara dengan I Made Cincin selaku Kelian Desa Pekraman Bangkala tanggal 24 April 2005

4.3. STATUS HUKUM TANAH KARANG AYAHAN DESA JIKA TIDAK ADA KETURUNAN (PUTUNG) DALAM SUATU KELUARGA DI DESA PEKRAMAN BANGKALA

4.3.1. KASTA DAN PEWARISAN TANAH KARANG AYAHAN DESA

Di Pulau Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu dan memiliki sistem pelapisan sosial dengan sejarah perkembangannya sendiri. Sistem pelapisan sosial masyarakat Bali yang beragama Hindu disebut wangsa yang pada dasarnya sama dengan sistem kasta, bahkan sampai sekitar satu abad yang lalu, penerimaan sistem kasta dianggap oleh golongan ortodoks sebagai satu-satunya kriteria yang menentukan apakah seseorang bisa disebut Hindu atau tidak. Dalam hal tertentu kasta telah mengalami pergeseran menjadi warna.⁵⁴

Masyarakat Bali dalam kenyataannya dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu.⁵⁵

- a. Golongan I, secara tradisional dikatakan berasal dari keturunan Dang Hyang Dwijendra dan Dang Hyang Asta Paka. Kedua pendeta ini diyakini sebagai cikal bakal wangsa Brahmana siswa dan Brahmana Budha di Bali. Umumnya rumah tinggal kedua golongan Brahmana tersebut dikenal dengan Grihya atau Geria.
- b. Golongan II, adalah golongan yang berasal dari keturunan para ksatria dari Kediri dan Majapahit.

⁵⁴ Ketut Wiana dan Raka Santeri, *Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad*, Yayasan Dharma Naradha, 1993, Denpasar, hal. 73

⁵⁵ Ibid. hal. 22

Keturunan ini disebut Ksatria wangsa. Tempat tinggalnya disebut dengan Jero atau Puri.

- c. Golongan III, adalah golongan yang bertempat tinggal di luar Jero, Puri dan Geria. Mereka dikenal dengan Jaba.

Menurut Ketut Wiana dan Raka Santeri kasta di Bali dapat dibedakan menjadi:⁵⁶

1. Kasta Brahmana

Istilah kata Brahmana berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tumbuh. Brahmana mempunyai tugas menumbuhkan daya cipta rohani umat manusia untuk mencapai ketenteraman hidup lahir batin. Selain itu juga bertugas mempelajari Kitab Suci Weda dan memelihara Kitab weda tersebut. Kasta ini tidak boleh melakukan kegiatan keduniawian dan untuk kehidupannya Brahmana harus dibantu oleh kasta-kasta yang lainnya. Kasta Brahmana adalah golongan fungsional yang setiap orangnya memiliki ilmu pengetahuan suci dan mempunyai bakat kelahiran untuk menyejahterakan masyarakat, negara dan umat manusia dengan jalan mengamalkan ilmu pengetahuannya dan dapat memimpin upacara keagamaan.

2. Kasta Ksatria

Istilah Ksatria berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya suatu susunan pemerintahan atau pemerintah, prajurit, daerah, keunggulan, kekuasaan dan kekuatan. Fungsi Ksatria adalah memimpin pemerintahan, untuk memerintah, memerlukan kekuasaan, kekuasaan itu memerlukan kekuatan. Kasta Ksatria itu merupakan golongan fungsional yang setiap orangnya memiliki kewibawaan, cinta tanah air, serta bakat kelahiran untuk memimpin dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat, negara dan umat manusia berdasarkan dharma.

⁵⁶ *Ibid.* hal 23

3. Kasta Waisya

Istilah Waisya berasal dari kata bahasa Sansekerta Vic yang berarti bermukim di atas tanah tertentu. Dari urat kata tersebut lalu berkembang menjadi kata Waisya yang artinya golongan pekerja atau seseorang yang mengusahakan pertanian. Waisya harus mahir dalam bercocok tanam, harus tahu soal keadaan tanah di seluruh daerah dan kaum Waisya harus selalu berdana punia pada golongan Brahmana dan membiayai pendirian tempat-tempat ibadah. Jadi kasta Waisya adalah golongan fungsional yang setiap orang memiliki watak tekun, terampil, hemat, cermat dan keahlian serta bakat kelahirannya untuk menyelenggarakan kemakmuran masyarakat negara dan kemanusiaan.

4. Kasta Sudra

Istilah Sudra juga berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya adalah golongan pelayan. Nama-nama dari golongan Sudra hendaknya menggunakan kata-kata yang mengandung arti kepuasaan atau pengabdian. Kasta Sudra ini hanya memiliki kekuatan jasmaniah, ketaatan serta bakat kelahiran untuk sebagai pelaku utama dalam tugas-tugas kemakmuran masyarakat, negara dan umat manusia atas petunjuk-petunjuk dari golongan fungsional lainnya.

Keberadaan wangsa/kasta pada pewarisan tanah karang ayahan desa terlihat adanya perbedaan pola pewarisannya. Pada wangsa/kasta bangsawan (triwangsa: Brahmana, Ksatria dan Waisya) berlaku sistem kewarisan mayorat dengan pembagian menurut aturan Panca/Catur Uddara di mana tanah karang ayahan desa tersebut hanya diwariskan kepada anak laki-laki yang tertua. Sedangkan terhadap golongan keluarga Sudra tanah karang ayahan desa

yang dipegang orang tuanya akan diwariskan kepada anak laki-lakinya yang terkecil.⁵⁷

4.3.2. Hak Perorangan Atas Tanah Karang Ayahan Desa di Desa Bangkala

Hak pakai atas tanah karang ayahan desa di desa Pekraman Bangkala ini diberikan khusus bagi warga desa Pekraman Bangkala, dan setiap keluarga bila ditarik garis ke atas pasti nenek moyangnya mendapatkan hak pakai atas tanah karang desa tersebut.⁵⁸

Warga desa Pekraman Bangkala yang mendapatkan hak pakai atas tanah karang ayahan desa, mempunyai kewajiban yang melekat pada hak atas tanah tersebut antara lain membayar uang pemasukan ke desa/atau melakukan darma baktinya untuk desa. Selain itu warga desa Pekraman Bangkala tersebut harus memanfaatkan tanah karang ayahan desa yang dikuasainya tersebut sesuai dengan peruntukan dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh kelian desa Pekraman Bangkala.⁵⁹

⁵⁷ Wawancara dengan I Made Cincin selaku Kelian Desa Pekraman Bangkala tanggal 24 April 2005

⁵⁸ Wawancara dengan I Made Astika selaku Perbekel/Kepala Desa Pekraman Bangkala tanggal 23 April 2005

⁵⁹ Wawancara dengan I Made Cincin selaku Kelian Desa Pekraman Bangkala tanggal 24 April 2005

Pewarisan tanah karang ayahan desa di desa Pekraman Bangkala ini hanya diberikan kepada anak tertua laki-laki atau anak termuda laki-laki, yang diberikan utuh tidak terbagi-bagi.⁶⁰

Hak perorangan ialah suatu hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba persekutuan hukum yang bersangkutan.

Jenis hak perorangan yang terpenting ada 6 (enam) yaitu:⁶¹

- a. hak milik, hak yasan (*inlands bezitrecht*);
- b. hak wenang pilih, hak kinacek, hak mendahului (*voorkeursrecht*);
- c. hak menikmati hasil (*genotrecht*);
- d. hak pakai (*gebruiksrecht*) dan hak menggarap/mengolah (*ontginningsrecht*);
- e. hak imbalan jabatan (*ambtelijk profijt recht*); dan
- f. hak wenang beli (*naastingrecht*).

Dari jenis hak perorangan tersebut penguasaan atas tanah karang desa di desa Pekraman Bangkala termasuk kelompok hak pakai (*gebruiksrecht*) dan hak menggarap/mengolah (*ontginningsrecht*).

⁶⁰ Wawancara dengan I Made Cincin selaku Kelian Desa Pekraman Bangkala tanggal 24 April 2005

⁶¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Dalam Sketsa*, hal. 8

Pertama-tama harus diperhatikan, bahwa hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat, sebagai seorang warga persekutuan, maka tiap individu mempunyai hak untuk:⁶²

- a. mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti rotan, kayu, dan lain sebagainya;
- b. memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan;
- c. mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar;
- d. membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah itu terus menerus; dan
- e. mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan.

Perbuatan-perbuatan khususnya yang dimaksudkan ayat c, d, dan e di atas, maka terjadi suatu perhubungan perseorangan antara seorang warga persekutuan dengan masing-masing pohon, tanah, dan kolam itu. Agar dimaklumi oleh warga-warga persekutuan lainnya, lazimnya diberi tanda pelarangan yang religio-magis itu, sehingga hasil pohon, tanah ataupun kolam tersebut hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan saja, lain orang tidak diperbolehkan mengambil hasilnya. Jika perhubungan perseorangan ini kemudian terputus, sehingga hak perseorangan menjadi

⁶² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 107

hilang, maka kembalilah hak persekutuan (hak ulayat) untuk menguasai tanah.

Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang umum disebut hak milik. Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dapat dilakukan sendiri secara individual atau bersama-sama dengan warga kelompok yang lain. Tidak ada kewajiban untuk menguasai dan penggunaannya secara kolektif. Oleh karena itu penguasaan tanahnya dirumuskan dengan sifat individual.⁶³

Hak penguasaan yang individual tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasainya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Bukan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok dipenuhi dengan penggunaan sebagian tanah bersama oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁶⁴

⁶³ Budi Harsono *Op. cit.* hal. 181

⁶⁴ *Ibid.* hal. 181-182

Hak individual tersebut bukanlah bersifat pribadi semata-mata. Disadari, bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah bersama. Oleh karena itu dalam penggunaannya tidak boleh hanya berpedoman pada kepentingan pribadi semata-mata, melainkan juga harus diingat kepentingan bersama, yaitu kepentingan kelompoknya. Sifat penguasaan yang demikian itu pada dirinya mengandung apa yang disebut unsur kebersamaan.⁶⁵

Jika seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah untuk mengerjakan tanah itu terus-menerus dan menanam pohon itu di atas tanah itu, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu, hak milik ini dapat diperoleh, meskipun yang mengerjakan tanah itu praktis tidak boleh lebih dari satu atau dua tahun panen. Apabila hak mengerjakan tanah itu tidak dapat lebih lama daripada satu kali panen saja, maka warga persekutuan yang bersangkutan sesungguhnya hanya memperoleh hak mempergunakan tanah itu saja (ter Haar menamakan ini *genots recht*) dan bukan hak milik, hak menggunakan atau memungut hasil untuk satu panen saja. Apabila kemudian tanah itu ditinggalkan dan tidak diurus lagi oleh yang berkepentingan, maka tanah itu dikuasai oleh hak ulayat.

⁶⁵ *Ibid.* Hal. 182

Hak milik dari seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu pengertiannya adalah, bahwa warga berhak sepenuhnya atas tanah, tetapi dengan ketentuan wajib menghormati.⁶⁶

- a. Hak ulayat desanya;
- b. Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah;
- c. Peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi ijin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya, selama tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagari.

Hak milik atas tanah ini, yang dalam bahasa Belanda disebut *Inlands bezitrecht* artinya adalah bahwa pemiliknya berkuasa penuh atas tanah yang bersangkutan seperti halnya ia menguasai rumah, ternak, sepeda atau lain-lain benda miliknya.

Pada tanah hak milik adat seperti tanah ayahan desa, wewenang si pemilik hanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tersebut pada a, b, c di atas tadi. Hak milik ini disebut hak yasan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konversi Pasal II (1) Undang-Undang Pokok Agraria menjadi Hak Milik Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ini.

⁶⁶ *Ibid.* hal. 108

Perlu kiranya di kemukakan di sini, bahwa di samping hak milik atas tanah (*inlands bezitrecht*) demikian ini, dikenal juga adanya hak milik terkekang atau terbatas atas tanah (*ingeklemd inlands bezitrecht*), yaitu apabila pemilikan kekuasaan atas tanah tersebut dibatasi oleh hak pertuanan desa. Tergantung dari kuat atau tidaknya pengaruh hak pertuanan desa atas tanah yang dikuasai itu apakah dan sampai di manakah ada batasan terhadap hak milik atas tanah dimaksud.

Kalau pertuanan desa itu masih sangat kuat, maka hampir tidak mungkin hak milik atas tanah ini dipindahkan ke tangan orang lain, bahkan ada daerah yang hak milik itu hanya dimiliki untuk jangka yang tertentu dan pada akhir waktu itu tanahnya harus diserahkan kepada lain anggota persekutuan desa. Sesuai ketentuan-ketentuan konversi VII Undang-Undang Pokok Agraria menjadi hak milik Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

Apabila hak pertuanan desa itu sudah lemah, maka hak milik atas tanah setelah wafatnya si pemilik dengan sendirinya jatuh kepada tangan ahli warisnya, dan ini hanya dapat dicabut dengan alasan si pemilik dengan segenap keluarganya meninggalkan daerah desa tersebut untuk

selama-lamanya (Ketentuan Konversi Pasal VII menjadi Hak Milik Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak menggunakan tanah atau memungut hasil tanah hanya untuk memanen saja, pada umumnya berlaku bagi orang luar bukan warga persekutuan yang sudah mendapat ijin untuk mengerjakan sebidang tanah, serta telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti membayar mesi (Jawa atau uang pemasukan (Aceh)). Dalam kenyataan hak memungut hasil ini dimiliki lebih lama dari pada satu panen saja tetapi secara adat masa itu harus dilihat sebagai suatu masa satu panen yang bersambung dengan masa atau panen berikutnya dan seterusnya.⁶⁷

Supomo menyebut adanya hak usaha atas sebidang tanah adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang untuk menganggap sebidang tanah tertentu sebagai tanah miliknya, asal saja si pemilik tanah memenuhi kewajiban-kewajiban serta menghormati pembatasan-pembatasan yang melekat pada hak itu, berdasarkan peraturan untuk tanah partikelir di sebelah barat sungai Cimanuk (Staatsblad 1912 No. 422 jo. 613).⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 109

⁶⁸ Supomo dalam Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995, hal 109-110

Hak usaha ini oleh Van Vollenhoven dinamakan hak menggarap (*bouwen bewerkingsrecht*). Kewajiban-kewajiban apakah yang harus dipenuhi oleh si pemilik hak usaha terhadap tuan tanah yang mempunyai hak eigendom atas tanah partikelir tersebut. Adapun kewajiban-kewajiban si pemilik hak usaha adalah antara lain:⁶⁹

1. membayar semacam pajak yang dinamakan cukai;
2. melakukan macam-macam pekerjaan untuk keperluan tuan tanah, seperti penjagaan desa di waktu malam, memelihara jalan-jalan raya.

Para pemilik hak usaha atas tanah menamakan tanah itu sebagai tanahnya serta menganggap dirinya berkuasa penuh untuk meperlakukan tanah itu semau-maunya, asal saja mereka memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap tuan tanah seperti tersebut di atas. Semua hak tersebut bersifat turun temurun (Keputusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 29-7-1922).

Sukanto memberikan istilah hak wenang pilih/*voorkeursrecht* bagi perseorangan warga persekutuan yang membuka tanah ataupun yang menempatkan tanda-tanda pelarangan (pagar dan lain sebagainya) pada tanah yang bersangkutan. Hak ini memberikan kesempatan kepada

⁶⁹ Van Vollenhoven dalam Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 110

warga yang pertama-pertama membuka tanah serta mengerjakan tanah tertentu itu, untuk lebih dahulu (artinya mendahului yang lain-lain) kembali menggarap tanah-tanah yang dimaksud, apabila berhubungan dengan sesuatu hak tanah itu orang tersebut meninggalkan tempat itu untuk masa tertentu. Tanah-tanah yang ada hak wewenang pilih demikian ini di Kalimantan disebut burukan.⁷⁰

4.3.3. Kedudukan Tanah Karang Ayahan Desa Pekraman Bangkala dalam Keluarga yang Tidak Ada Keturunan (Putung)

Tanah karang ayahan desa merupakan tanah hak milik desa Pekraman Bangkala yang penguasaannya diberikan kepada warga desa yang berhak, dan tanah karang ayahan desa itupun pada dasarnya boleh diwariskan kepada anak keturunannya. Khusus di Desa Pekraman Bangkala hak pakai atas tanah karang ayahan desa tidak boleh dijadikan obyek jual-beli, gadaikan kepada orang lain.⁷¹

Akibat dari sistem patrilineal yang dianut masyarakat Bali, maka anak perempuan bukanlah ahli waris, kecuali anak perempuan tersebut telah berubah status menjadi sentana rajeg, demikian pula dengan keberadaan dari seorang janda.

⁷⁰ Soekanto dalam Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 110

⁷¹ I Made Cincin *Op. Cit.*

Tetapi jika si janda tetap dalam lingkungan keluarga suaminya dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang janda mulai dari tidak menikah lagi tanpa persetujuan dari keluarga suaminya, tidak melakukan pergendakan, tidak suka judi, tidak boros, tetap tinggal dalam lingkungan suaminya, memelihara anak-anaknya dengan baik, melakukan peribadatan dipelinggihan suaminya, bersedia untuk melakukan pengabenan jenasah almarhum, melunasi hutang-hutang dari almarhum, dan melakukan ayahan desa maka si janda berhak untuk mengurus dan menikmati harta peninggalan suaminya termasuk menguasai hak pakai atas tanah karang ayahan desa tersebut.

Adakalanya keturunan laki-lakipun bisa tidak menjadi ahli waris, hal ini disebabkan oleh karena beberapa alasan antara lain:⁷²

1. anak laki-laki yang kawin nyeburin;
2. anak laki-laki yang diangkat menjadi anak angkat orang lain;
3. anak laki-laki yang menyembah jenasah orang lain yang tidak termasuk tunggal sembah (*ngelung sentana*);
4. anak laki-laki yang tidak melaksanakan darma sebagai anak misalnya: durhaka terhadap leluhur, dan orang tua.

⁷² Soeripto, *beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, Universitas Negeri Jember, 1973, hal. 63

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris dalam pengertian baik dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan maka kejadian ini bisa dikategorikan sebagai tidak ada keturunan atau *putung*.⁷³

Dari karakteristik yang berbeda dengan harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi pada umumnya ini, maka bila dalam suatu keluarga yang menguasai tanah karang ayahan desa yang tidak memiliki anak keturunan (*putung*) maka tanah karang ayahan desa yang dikuasainya tersebut harus dikembalikan ke dalam penguasaan desa.⁷⁴

Putung atau ketidak adanya keturunan pada suatu keluarga pemegang Hak Pakai atas tanah karang ayahan desa di desa Pekraman Bangkala merupakan salah satu alasan hapusnya Hak Pakai tersebut.

Tanah karang ayahan desa tersebut akan kembali ke dalam penguasaan desa selain karena ketidak adanya keturunan dalam suatu keluarga yang menguasai tanah karang ayahan desa juga bisa karena tidak dipergunakannya tanah tersebut sebagaimana mestinya, dan tanah tersebut dijual, digadaikan oleh pemegang haknya. Dalam hal tanah

⁷³ Wawancara dengan I Made Cincin selaku Kelian Desa Pekraman Bangkala tanggal 24 April 2005

⁷⁴ Wawancara dengan I Made Astika selaku Perbekel/Kepala Desa Pekraman Bangkala tanggal 23 April 2005

karang ayahan desa yang telah dipindah tangankan baik karena dijual maupun digadaikan tanah tersebut akan kembali ke desa dengan sebelumnya yang melakukan perbuatan hukum tersebut harus membayar denda sesuai dengan ketentuan adat desa Pekraman Bangkala.⁷⁵

Proses pengambil alihan tanah karang ayahan desa dalam hal ketidak adanya keturunan dalam suatu keluarga yang menguasai tanah karang ayahan desa, dimulai dengan penelitian garis keturunan dari keluarga tersebut oleh Bendesa Adat. Selanjutnya bila telah diputuskan oleh Bendesa Adat bahwa keluarga tersebut memang betul-betul tidak memiliki keturunan maka tanah tersebut akan dikembalikan ke desa, untuk selanjutnya akan diberikan kepada warga desa Pekraman Bangkala yang belum memiliki tanah karang ayahan desa. Hal ini diawali dengan dilakukannya upacara *pitra yadnya* oleh warga desa Pekraman Bangkala yang ditunjuk untuk mengelola tanah karang ayahan desa tersebut.

Pengambil alihan tanah karang ayahan desa ini dilandasi dengan tujuan awal adanya hak atas tanah tersebut. Tanah karang ayahan desa ini bukan hak milik dari pemegang hak atas tanah melainkan hanya hak pakai. Jadi hak pakai atas tanah karang ayahan desa tersebut tidak serta merta

⁷⁵ Wawancara dengan I Made Cincin selaku Kelian Desa Pekraman Bangkala tanggal 24 April 2005

dapat diwarisi secara mutlak oleh ahli waris dari keluarga pemegang hak pakai tersebut. Selain itu hak pakai atas tanah karang ayahan desa tersebut terkait dengan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban dari pemegang hak tersebut kepada desa karena tanah karang desa pada dasarnya hak atas tanah karang ayahan desa tersebut milik desa. Desa berwenang menentukan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah tersebut kepada desa sebagai pemilik tanah tersebut.

Ketidak adanya keturunan pada suatu keluarga berarti tidak adanya pengayahan atau tidak ada subyek hukum yang berkewajiban untuk menjalankan tugas-tugas yang timbul dari penguasaan tanah karang ayahan desa tersebut. Tugas dan kewajiban tersebut merupakan hak yang mengikuti pada siapa tanah tersebut berada.

Ketidak adanya keturunan pada suatu keluarga menurut Hilman Hadikusuma⁷⁶ merupakan keadaan yang luar biasa, yang sangat jarang terjadi, dikarenakan suatu keluarga punah, meninggalkan harta peninggalan tanpa waris sama sekali dan tidak ada anggota kerabat bersangkutan yang tampil sebagai waris baik dalam hubungan pertalian darah, pertalian perkawinan atau pertalian adat, maka penguasaan dan pengurusan harta peninggalan itu diambil alih oleh

⁷⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 216-217

persekutuan hukum adat yang terdekat dengan persekutuan hukum adat pewaris.

Dalam proses pewarisan tanah karang ayahan desa bila terjadi ketidak adanya keturunan masih menggunakan aturan-aturan tidak tertulis yang diberikan secara lisan. Namun karena sejak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir, dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur oleh satu pihak berbeda dengan pihak yang lainnya.

Manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.⁷⁷ Di sinilah peran penting dari suatu hukum positif yang mengatur tentang suatu permasalahan hukum di masyarakat.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Manajemen PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 1

Berkaitan dengan itu pemerintah daerah provinsi Bali telah memberikan tanggapan yang serius tentang kelestarian tanah-tanah karang ayahan desa, terbukti dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang selanjutnya terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor: 03 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman:

Pasal 1 angka (10) disebutkan bahwa:

“Tanah karang ayahan desa pekraman adalah tanah milik desa pekraman yang berada baik di dalam maupun di luar desa pekraman”.

Pasal 9 menyebutkan bahwa:

“Harta kekayaan desa ini termasuk pekarangan desa/ayahan desa”

“untuk kelestariannya desa adat, krama desa dilarang untuk menjual atau memindah tangankan tanah karang ayahan desa, karena tanah karang ayahan desa tersebut selalu melekat kewajiban (ayahan) dari warga desa terhadap desa”.

“Tanah desa pekraman dan atau tanah milik desa pekraman tidak dapat disertipatkan atas nama pribadi”.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pewarisan di desa pekraman Bangkala ini tidak lepas dari sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut pada masyarakat Hindu di Bali. Selanjutnya kewarisan tanah karang ayahan desa mengikuti sistem kewarisan mayorat, yang mana tanah karang ayahan desa tersebut tidak boleh dibagi-bagi dan diwariskan secara penuh terhadap anak laki-laki tertua untuk wangsa bangsawan/tri wangsa (Brahmana, Ksatria dan Waisya), sedangkan wangsa Sudra tanah karang ayahan desa tersebut diwariskan secara penuh terhadap anak laki-laki bungsu.
2. Status hukum tanah karang ayahan desa di desa Pekraman Bangkala jika tidak ada keturunan (putung) dalam keluarga yang menguasai tanah karang ayahan maka tanah tersebut akan dikembalikan kepada desa dan oleh desa selanjutnya penguasaanya akan diberikan kepada warga desa Pekraman Bangkala yang berhak dengan melalui ketentuan dan upacara-upacara yang diwajibkan untuk perpindahan hak tersebut. Pengambil alihan oleh desa ini memenuhi ketentuan bahwa pada

dasarnya hak atas tanah tersebut milik desa dan warga desa yang bersangkutan menguasai dengan hak pakai.

5.2. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat kelemahan-kelemahan pada sistem pengaturan tanah karang ayahan desa tersebut, terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan penduduk, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan aturan yang baku tentang pengaturan terhadap tanah karang ayahan desa tersebut;
2. Peranan Kantor Pertanahan perlu ditingkatkan berkaitan dengan penguasaan tanah karang ayahan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, CV. Sumber Mas Bali, Denpasar, 1987;
- Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986;
- Dharmayuda, I Made Suasthawa, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 2001;
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;
- _____, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1982;
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1999;
- _____, *Hukum agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum tanah)*, Djambatan, Jakarta, 2002;
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 11, Bandung, 1999;
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995;
- Pudja, I Gede, dan Tjokorde Rai Sudartha, *Manawa Dharmasastra*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1982;
- Ruchiayat, Eddy, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, alumni, Bandung, 1999;
- Salman, Otje, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993;
- Sastrodihardjo, Soedjito, *Hukum Adat Realitas Penghidupan*, FH-UIL, Sept 1998;
- Sugangga, I.G.N., *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995;
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001;
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999;
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982;

- _____, *Masalah-Masalah Hukum*, No. 5 Tahun 1992;
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1983;
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Cet. Ke 4, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995;
- Soeripto, *beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, Universitas Negeri Jember, 1973;
- Wiana, Ketut, dan Raka Santeri, *Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad*, Yayasan Dharma Naradha, 1993, Denpasar;
- Vergoewen, J.,C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor .5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

PERATURAN ADAT

- Awig-Awig Desa Pakraman Bangkala, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.